



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 82 TAHUN 2012

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama serta unit kerja/SKPD dibawahnya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
5. Kinerja Organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

6. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

(1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Batam :

- a. Presentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
- b. Persentase balita dengan gizi buruk;
- c. Angka kematian ibu;
- d. Cakupan pelayanan drainase;
- e. Jumlah sarana dan prasarana Insfrastruktur Jalan;
- f. Jumlah sarana dan prasarana Insfrastruktur Jembatan;
- g. Jumlah jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi dikawasan permukiman;
- h. Tingkat kecukupan sarana LLAJ;
- i. Tingkat kelaikan sarana LLAJ;
- j. Angka Partisipasi Kasar (APK SD, SMP dan SMA/SMK);
- k. Angka Partisipasi Murni (APM SD, SMP dan SMA/SMK);
- l. Persentase Koperasi Aktif;
- m. Persentase perusahaan yang mengurus izin pembuangan air limbah dengan target 50 perusahaan;
- n. Jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu;
- o. Jumlah RTP perikanan budidaya dan mengolah hasil Perikanan yang diberi bantuan sarana usahanya;
- p. Jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin;
- q. Persentase penyebaran informasi publik melalui media cetak dan elektronik;

7
2 A

- r. Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD diLingkungan Pemerintah Kota Batam;
 - s. Tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Batam;
 - t. Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Batam;
 - u. Jumlah bantuan alat penerangan dan kelistrikan bagi tim TKPKD dan masyarakat hinterland guna meningkatkan kualitas masyarakat;
 - v. Bertambahnya jumlah penduduk yang terlayani air bersih didaerah hinterland;
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

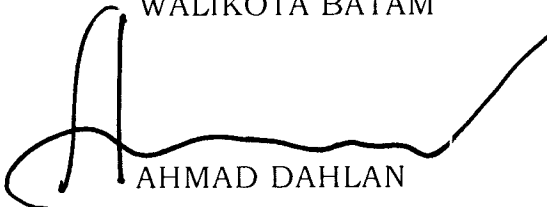
Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

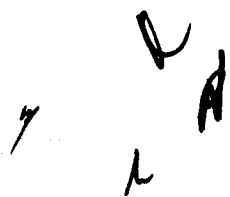
WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH


AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 2707



INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BATAM

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Hidup melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Persentase Balita dengan Gizi Buruk	$= \frac{\text{Jumlah Masyarakat Miskin yang mendapatkan pelayanan}}{\text{Jumlah Masyarakat Miskin}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah Balita Dengan Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{100.000 \text{ Kelahiran Hidup (KH)}} \times 100\%$ Jumlah Kematian Ibu yang dimaksud adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan	DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
2	Penyelenggaraan sistem drainase yang baik	Cakupan pelayanan drainase Panjang sarana dan prasarana Infrastruktur Jalan Panjang sarana dan prasarana Infrastruktur Jembatan	Jumlah Drainase yang dilayani Panjang jalan yang dibangun Panjang jembatan yang dibangun	DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM DINAS PEKERJAAN UMUM
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar, serta utilitas di wilayah perkotaan dan hinterland	Jumlah Jalan lingkungan yang perlu dibangun/direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan	Panjang jalan lingkungan yang di bangun	DINAS TATA KOTA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
4	Meningkatnya sistem transportasi dan perhubungan secara optimal	Tingkat Kelaikan sarana LLAJ Tingkat Kecukupan sarana LLAJ	$= \frac{\text{Jumlah Sarana LLAJ yang Laik}}{\text{Jumlah Sarana LLAJ}} \times 100\%$ $= \frac{\text{Jumlah Sarana LLAJ yang tercukupi}}{\text{Jumlah Sarana LLAJ}} \times 100\%$	DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
5	Meningkatkan daya tampung SD, SMP, SMA	Angka Partisipasi Kasar (APK SD)	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SD}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMP)	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Kasar (APK SMA/SMK)	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM SD)	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SD (setara 7-12 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Partisipasi Murni (APM SMP)	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMP (setara 13-15 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN
6	Mendorong berkembangnya jumlah koperasi berbagai jenis usaha termasuk koperasi yang bergerak disektor pertanian	Angka Partisipasi Murni (APM SMA/SMA)	$= \frac{\text{Jumlah Siswa SMA (setara 16-18 tahun)}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 16-18 Tahun}} \times 100\%$	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase koperasi aktif	$= \frac{\text{Jumlah Koperasi aktif}}{\text{Jumlah Koperasi Seluruhnya}} \times 100\%$	DINAS PMPK-UKM
7	Penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan limbah cair pemulihan dan industri	Persentase perusahaan yang mengurus izin pembuangan air limbah dengan target 50 perusahaan	$= \frac{\text{Jumlah perusahaan yang mengurus izin pembuangan air limbah}}{50 \text{ perusahaan}} \times 100\%$	BAPEDALDA

DA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
8	Memfasilitasi standar perijinan pada kawasan-kawasan binaan Pengelola Kawasan.	Jumlah Perizinan yang telah diterbitkan tepat waktu	Jumlah Izin Yang diterbitkan	BPM
9	Fasilitasi pembangunan pasar dan pusat transaksi perikanan laut internasional dengan pola swasta	Jumlah RTP Perikanan budidaya dan mengolah hasil perikanan yang diberi bantuan sarana usahanya	Jumlah RTP yang diberi bantuan	DINAS KP2K
10	Percepatan penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah rumah layak huni Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN
11	Terwujudnya kerjasama dengan media cetak lokal untuk keluhan pelayanan publik (rubrik Walikota menjawab)	Persentase Penyebaran Informasi Publik melalui media cetak dan elektronik	$= \frac{\text{Jumlah informasi publik yang disebar}}{\text{Jumlah informasi publik}} \times 100\%$	BADAN KOMINFO
12	Mendorong implementasi 'pelayanan prima' Kota Batam	Tingkat pemenuhan kepuasan masyarakat pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH (BAG. ORGANISASI)
13	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tahun berjalan	INSPEKTORAT
14	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemko Batam	Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	INSPEKTORAT
15	Memfasilitasi dan mempermudah upaya masyarakat untuk mengakses KUR pada industri dan pedagang mikro, kecil dan menengah.	Jumlah Bantuan alat penerangan dan kelistrikan bagi tim TKPKD dan Masyarakat Hinterland guna meningkatkan kualitas masyarakat	Jumlah alat penerangan yang tersalurkan kepada masyarakat hinterland	DINAS PMPK-UKM
16	Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum memenuhi 80% cakupan layanan	Bertambahnya jumlah penduduk yang terlayani air bersih di daerah hinterland	Jumlah penduduk yang telah mendapatkan air bersih di daerah hinterland	DINAS PU

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

